



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.1.1, Catatan 5.3.2.4 dan Catatan 5.3.2.5 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyajikan Kas di Kas Daerah, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.061.894.332,59, Rp19.812.391.872,92 dan Rp59.739.364.684,21. Dari nilai utang tersebut, diantaranya sebesar Rp62.613.407.309,52 merupakan utang yang timbul dari gagal bayar atas pengeluaran anggaran yang tidak cukup dana yang disebabkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2017 tidak sesuai pedoman yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga menggunakan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp48.735.547.471,41 untuk membayar belanja pada tahun 2017, sehingga sisa kas di Kas Daerah menjadi Rp1.061.894.332,59. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah membayar utang yang ditimbulkan dari gagal bayar tersebut pada tahun 2018 dengan cara pergeseran anggaran yang berdampak mengganggu pelaksanaan kegiatan TA 2018. Jika Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mematuhi pedoman penyusunan APBD dan ketentuan terkait lainnya, maka utang sebesar Rp62.613.407.309,52 tidak timbul sebagai kewajiban dan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp48.735.547.471,41 pada 31 Desember 2017 tetap tersedia untuk kegiatan sesuai peruntukannya.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.2.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyajikan nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2017 sebesar Rp119.214.439.955,10. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp63.598.039.955,10 merupakan penyertaan modal pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas PDAM Tirta Dharma adalah mayoritas sehingga pencatatannya menggunakan metode ekuitas. Laporan Keuangan PDAM Tirta Dharma Per 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adanya kejadian penting setelah tanggal neraca yaitu pada awal tahun 2018 di PDAM Tirta Dharma Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi kasus hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menyangkut aset perusahaan yang bernilai Rp4.741.187.138,00, yang mempengaruhi jumlah aset perusahaan yang dicantumkan dalam laporan keuangan PDAM per 31 Desember 2017.

Terjadinya kasus hukum tersebut berdampak pada nilai penyertaan modal pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada PDAM Tirta Dharma. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka penyertaan modal tersebut.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 07.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 dan Nomor 07.C/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 25 Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan, ***



Tornanda Syaifulah

Register Negara Akuntan No. RNA 17121



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

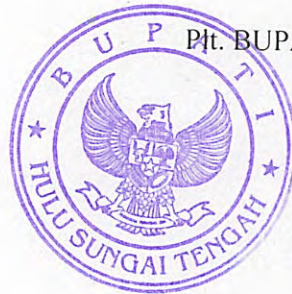
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdiri dari ; (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas dan (7) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Barabai, Mei 2018

Pt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



H. A. CHAIRANSYAH



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO.	URAIAN	CaLK	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	19,330,613,138.00	12,083,082,100.80	62.51	9,965,754,476.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	10,631,841,078.00	11,311,663,467.00	106.39	10,017,993,958.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	7,500,000,000.00	7,310,808,360.00	97.48	7,275,374,095.00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	121,145,044,660.00	87,716,201,313.01	72.41	69,735,035,663.00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	5.1.1.1	158,607,498,876.00	118,421,755,240.81	74.66	96,994,158,192.00
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1	16,952,841,000.00	14,566,891,235.00	85.93	19,268,751,697.00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.2	81,574,297,939.00	79,695,897,966.00	97.70	141,560,244,324.00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.3	519,741,516,000.00	519,741,516,000.00	100.00	529,034,959,000.00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.4	180,472,545,000.00	156,213,347,801.00	86.56	242,075,633,951.00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)		798,741,199,939.00	770,217,653,002.00	96.43	931,939,688,972.00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
16	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.5	177,360,856,000.00	177,360,856,000.00	100.00	88,258,129,000.00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16)		177,360,856,000.00	177,360,856,000.00	100.00	88,258,129,000.00
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	5.1.1.2.6	83,980,761,428.00	58,819,694,016.00	70.04	52,980,512,575.00
20	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19)		83,980,761,428.00	58,819,694,016.00	70.04	52,980,512,575.00
21	Total Pendapatan Transfer (14 + 17 + 20)	5.1.1.2	1,060,082,817,367.00	1,006,398,203,018.00	94.94	1,073,178,330,547.00
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
23	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	400,000,000.00	345,722,060.00	86.43	774,605,000.00
24	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	0.00	0.00	0.00	96,875,855,000.00
25	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (23 s/d 24)	5.1.1.3	400,000,000.00	345,722,060.00	86.43	97,650,460,000.00
26	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 25)	5.1.1	1,219,090,316,243.00	1,125,165,680,318.81	92.30	1,267,822,948,739.00
27	BELANJA					
28	BELANJA OPERASI					
29	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	445,195,772,494.00	435,522,347,699.00	97.83	488,935,927,300.00
30	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	223,558,744,551.00	192,240,795,538.00	85.99	219,358,363,523.00
31	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	36,027,381,000.00	24,236,183,159.00	67.27	40,002,746,442.00
32	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	13,637,249,500.00	12,690,050,000.00	93.05	1,697,250,000.00
33	Jumlah Belanja Operasi (29 s/d 32)	5.1.2.1	718,419,247,545.00	664,689,376,396.00	92.52	749,994,287,265.00
34	BELANJA MODAL					
35	Belanja Tanah		5,649,957,940.00	3,251,182,000.00	57.54	1,817,431,500.00
36	Belanja Peralatan dan Mesin		63,980,915,775.00	57,068,557,012.10	89.20	35,039,732,556.00
37	Belanja Bangunan dan Gedung		148,980,624,623.00	102,559,577,895.88	68.84	58,490,356,142.00
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		204,319,773,840.00	157,676,383,782.93	77.17	242,376,868,767.00
39	Belanja Aset Tetap Lainnya		5,106,584,550.00	4,057,402,598.00	79.45	2,235,158,000.00
40	Belanja Aset Lainnya		129,438,950.00	88,990,000.00	68.75	263,360,000.00
41	Jumlah Belanja Modal (35 s/d 40)	5.1.2.2	428,167,295,678.00	324,702,093,288.91	75.84	340,222,906,965.00
42	BELANJA TAK TERDUGA					
43	Belanja Tak Terduga		1,812,721,000.00	204,000,000.00	11.25	816,074,200.00
44	Jumlah Belanja Tidak Terduga (43)	5.1.2.3	1,812,721,000.00	204,000,000.00	11.25	816,074,200.00
45	JUMLAH BELANJA (33 + 41 + 44)	5.1.2	1,148,399,264,223.00	989,595,469,684.91	86.17	1,091,033,268,430.00
46	TRANSFER					
47	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
48	Bagi Hasil Pajak Daerah		1,152,277,813.00	333,002,464.00	28.90	833,281,000.00
49	Bagi Hasil Retribusi		1,070,475,220.00	430,156,564.00	40.18	863,925,000.00
50	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa (48 s/d 49)		2,222,753,033.00	763,159,028.00	34.33	1,697,206,000.00
51	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
52	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		185,202,616,000.00	184,754,130,000.00	99.76	163,483,290,000.00
53	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		863,014,900.00	863,014,900.00	100.00	784,044,900.00
54	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (52 s/d 53)		186,065,630,900.00	185,617,144,900.00	99.76	164,267,334,900.00
55	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL (50 + 54)	5.1.2.4	188,288,383,933.00	186,380,303,928.00	98.99	165,964,540,900.00
56	SURPLUS / DEFISIT (26 - 45 - 55)	5.1.2.5	(117,597,331,913.00)	(50,810,093,294.10)	43.21	10,825,139,409.00
57	PEMBIAYAAN					
58	PENERIMAAN DAERAH					
59	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.3.1.1	62,097,331,913.00	62,097,331,912.69	100.00	51,272,192,503.45
60	Penarikan Penyertaan Modal	5.1.3.1.2	55,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00
61	Jumlah Penerimaan (59 s/d 60)	5.1.3.1	117,597,331,913.00	62,097,331,912.69	52.81	51,272,192,503.45
62	PENGELUARAN DAERAH					
63	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00
64	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Jumlah Pengeluaran (63 s/d 64)	5.1.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00
66	PEMBIAYAAN NETTO (61 - 65)	5.1.3	117,597,331,913.00	62,097,331,912.69	52.81	51,272,192,503.45
67	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (56 + 66)	5.1.4	0.00	11,287,238,618.59		62,097,331,912.45

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Barabai, Mei 2018
Pt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. A. CHAIRANSYAH



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

No.	URAIAN	CaLK	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	62,097,331,912.45	51,272,192,504.32
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.1	62,097,331,912.69	51,272,192,503.45
3	Sub Total (1 -2)		(0.24)	0.87
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.2	11,287,238,618.59	62,097,331,912.45
5	Sub Total (3 + 4)		11,287,238,618.59	62,097,331,912.45
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0.24	(0.87)
7	Lain-lain		0.00	0.00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.2.3	11,287,238,618.59	62,097,331,912.45

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Barabai, Mei 2018

Pt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. A. CHAIRANSYAH



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NERACA
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No	Uraian	CaLK	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR			
3	Kas			
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	1,061,894,332.59	47,765,099,582.45
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	62,810,967.00	0.00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	2,063,872.00	6,096,311.00
7	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.3.1.1.4	9,217,553,940.00	13,293,843,687.00
8	Kas di FKTP	5.3.1.1.5	370,572,304.00	1,038,388,643.00
9	Kas Dana BOS	5.3.1.1.6	582,613,512.00	682,283,644.00
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.7	0.00	5,380.00
11	Jumlah Kas (4 s/d 10)		11,297,508,927.59	62,785,717,247.45
12	Piutang			
13	Piutang Pajak		3,764,645,502.00	5,738,683,669.00
14	Penyisihan Piutang Pajak		(2,117,950,929.39)	(3,680,191,005.02)
15	Piutang Pajak Netto	5.3.1.1.8	1,646,694,572.61	2,058,492,663.98
16	Piutang Retribusi		433,885,283.00	632,490,283.00
17	Penyisihan Piutang Retribusi		(78,128,626.50)	(104,230,389.00)
18	Piutang Retribusi Netto	5.3.1.1.9	355,756,656.50	528,259,894.00
19	Piutang Dana Bagi Hasil - Pemerintah Provinsi		16,438,596,080.82	13,304,444,856.00
20	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil - Pemerintah Provinsi		0.00	0.00
21	Piutang Dana Bagi Hasil - Pemerintah Provinsi Netto	5.3.1.1.10	16,438,596,080.82	13,304,444,856.00
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0.00	3,449,911,429.00
23	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0.00	0.00
24	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto	5.3.1.1.11	0.00	3,449,911,429.00
25	Piutang Lain-Lain		8,406,654,605.00	10,572,880,785.00
26	Penyisihan Piutang Lain-Lain		(218,253,444.99)	(188,331,896.18)
27	Piutang Lain-Lain Netto	5.3.1.1.12	8,188,401,160.01	10,384,548,888.82
28	Jumlah Piutang Netto (14 + 17 + 20 + 23 + 26)		26,629,448,469.94	29,725,657,731.80
29	Beban Dibayar di Muka	5.3.1.1.13	87,821,250.00	91,500,000.00
30	Persediaan	5.3.1.1.14	25,899,373,603.81	17,677,171,196.17
31	Jumlah Aset Lancar (11 + 28 + 29 + 30)	5.3.1.1	63,914,152,251.34	110,280,046,175.42
32	INVESTASI JANGKA PANJANG			
33	Investasi Non Permanen			
34	Investasi Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	311,107,500.00	311,107,500.00
35	Penyisihan Dana Bergulir	5.3.1.2.1.2	(311,107,500.00)	(311,107,500.00)
36	Jumlah Investasi Non Permanen (34 - 35)	5.3.1.2.1	0.00	0.00
37	Investasi Permanen			
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	119,214,439,955.10	123,223,968,765.04
39	Jumlah Investasi Permanen (38)	5.3.1.2.2	119,214,439,955.10	123,223,968,765.04
40	Jumlah Investasi Jangka Panjang (36 + 39)	5.3.1.2	119,214,439,955.10	123,223,968,765.04
41	ASET TETAP			
42	Tanah	5.3.1.3.1	316,594,886,839.00	313,282,272,839.00
43	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	321,756,839,783.16	271,620,172,220.65
44	Gedung Dan Bangunan	5.3.1.3.3	740,350,675,625.44	704,058,333,804.89
45	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1,713,342,773,982.33	1,536,350,937,767.63
46	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	37,796,900,795.85	30,389,594,963.33
47	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	112,204,208,302.06	11,828,888,937.06
48	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1,371,907,707,988.98)	(1,180,548,865,026.41)
49	Jumlah Aset tetap (42 s/d 48)	5.3.1.3	1,870,138,577,338.86	1,686,981,335,506.15
50	ASET LAINNYA			
51	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.4.1	4,439,000,507.79	150,000,000.00
52	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	1,077,205,000.00	603,946,500.00
53	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(300,551,751.00)	(1,155,806,894.00)
54	Aset Tidak Berwujud Netto (63 - 64)		776,653,249.00	(551,860,394.00)
55	Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	13,559,213,831.19	78,205,163,189.55
56	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(1,594,834,584.00)	(14,674,079,991.00)
57	Aset Lain-Lain Netto (63 - 64)		11,964,379,247.19	63,531,083,198.55
58	Jumlah Aset Lainnya (51 + 54 + 57)	5.3.1.4	17,180,033,003.98	63,129,222,804.55
59	TOTAL ASET		2,070,447,202,549.28	1,983,614,573,251.16

No	Uraian	CaLK	2017 (Rp)	2016 (Rp)
60	KEWAJIBAN			
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1	10,270,309.00	0.00
63	Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat	5.3.2.2	85,220,575,596.00	42,859,424,497.00
64	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.3	47,033,951.00	107,920,363.00
65	Utang Belanja	5.3.2.4	19,812,391,872.92	13,226,868,245.76
66	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.5	59,739,364,684.21	615,438,272.00
67	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 66)		164,829,636,413.13	56,809,651,377.76
68	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0.00	0.00
69	TOTAL KEWAJIBAN (67 + 68)		164,829,636,413.13	56,809,651,377.76
70	EKUITAS	5.3.3	1,905,617,566,136.15	1,926,804,921,873.40
71	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2,070,447,202,549.28	1,983,614,573,251.16

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Barabai, Mei 2018

PIL. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



H. AL CHAIRANSYAH



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO.	URAIAN	CaLK	2017 (Rp)	2016 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL						
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
3	Pendapatan Pajak Daerah		12,096,559,715.80	15,763,143,186.00	(3,666,583,470.20)	(23.26)
4	Pendapatan Retribusi Daerah		11,106,047,156.00	10,679,390,552.00	426,656,604.00	4.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3,301,279,550.06	7,275,374,095.00	(3,974,094,544.94)	(54.62)
6	Lain-lain PAD Yang Sah		65,678,704,951.80	80,110,327,979.00	(14,431,623,027.20)	(18.01)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	5.4.1.1	92,182,591,373.66	113,828,235,812.00	(21,645,644,438.34)	(19.02)
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERUMBAHAN					
10	Dana Bagi Hasil Pajak		12,080,183,636.00	22,102,463,482.00	(10,022,279,846.00)	(45.34)
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		79,423,444,600.00	142,176,543,968.00	(62,753,099,368.00)	(44.14)
12	Dana Alokasi Umum		519,741,516,000.00	529,034,959,000.00	(9,293,443,000.00)	(1.76)
13	Dana Alokasi Khusus		156,213,347,801.00	242,075,633,951.00	(85,862,286,150.00)	(35.47)
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)		767,458,492,037.00	935,389,600,401.00	(167,931,108,364.00)	(17.95)
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA					
16	Dana Penyesuaian		177,360,856,000.00	88,258,129,000.00	89,102,727,000.00	100.96
17	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (16)		177,360,856,000.00	88,258,129,000.00	89,102,727,000.00	100.96
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		61,953,845,240.82	51,678,743,761.00	10,275,101,479.82	19.88
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (19)		61,953,845,240.82	51,678,743,761.00	10,275,101,479.82	19.88
21	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 17 + 20)	5.4.1.2	1,006,773,193,277.82	1,075,326,473,162.00	(68,553,279,884.18)	(6.38)
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO					
23	Pendapatan Hibah - LO		29,437,351,989.00	42,198,819,657.20	(12,761,467,668.20)	(30.24)
24	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (23)	5.4.1.3	29,437,351,989.00	42,198,819,657.20	(12,761,467,668.20)	(30.24)
25	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 24)	5.4.1	1,128,393,136,640.48	1,231,353,528,631.20	(102,960,391,990.72)	(8.36)
26	BEBAN					
27	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	437,582,298,105.00	488,686,277,802.00	(51,103,979,697.00)	(10.46)
28	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	194,164,425,826.24	243,157,347,914.03	(48,992,922,087.79)	(20.15)
29	Beban Hibah	5.4.2.1.3	23,485,011,134.00	40,002,746,442.00	(16,517,735,308.00)	(41.29)
30	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	12,690,050,000.00	1,697,250,000.00	10,992,800,000.00	647.63
31	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.5	192,597,872,554.10	337,095,482,406.38	(144,497,609,852.28)	(42.67)
32	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	2,259,814,145.88	3,972,753,290.20	(1,712,939,144.32)	(43.12)
33	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.2.1.7	1,054,334,000.00	1,697,206,000.00	(642,872,000.00)	(37.88)
34	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi	5.4.2.1.8	934,358,000.00	0.00	934,358,000.00	0.00
35	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.1.9	184,754,130,000.00	66,607,435,000.00	118,146,695,000.00	177.38
36	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.1.10	863,014,900.00	605,086,800.00	256,928,100.00	42.39
37	Beban Lain-lain	5.4.2.1.11	1,707,882,100.28	9,367,182,522.22	(7,659,300,421.94)	(81.77)
38	JUMLAH BEBAN (27 s/d 37)	5.4.2	1,052,093,190,765.50	1,192,889,768,176.83	(140,796,577,411.33)	(11.80)
39	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (25 - 38)		76,299,945,874.98	38,463,760,454.37	37,836,185,420.61	98.37
40	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
41	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0.00	0.00	0.00	0.00
42	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00	0.00	0.00
43	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
44	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0.00	0.00	0.00	0.00
45	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00	0.00	0.00
46	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.6	6,803,455,326.04	(1,940,033,300.00)	8,743,488,626.04	0.00
47	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (41 s/d 46)		6,803,455,326.04	(1,940,033,300.00)	8,743,488,626.04	0.00
48	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39 + 47)		69,496,490,548.94	36,523,727,154.37	46,579,674,046.65	0.00
49	POS LUAR BIASA					
50	Pendapatan Luar Biasa		0.00	0.00	0.00	0.00
51	Beban Luar Biasa	5.4.4.2	204,000,000.00	816,074,200.00	(612,074,200.00)	(75.00)
52	POS LUAR BIASA (50-51)		(204,000,000.00)	(816,074,200.00)	612,074,200.00	0.00
53	SURPLUS/DEFISIT-LO (48 + 52)		69,292,490,548.94	35,707,652,954.37	47,191,748,246.65	132.16

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Barabai, Mei 2018

PIR. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



H. A. CHAIRANSYAH



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	CaLK	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2.	Arus Masuk Kas :	5.5.1.1		
3.	Penerimaan Pajak Daerah		12,083,082,100.80	9,965,754,476.00
4.	Penerimaan Retribusi Daerah		11,309,599,595.00	10,017,993,958.00
5.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7,310,808,360.00	7,275,374,095.00
6.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		87,389,531,313.01	69,705,335,663.00
7.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		14,566,891,235.00	19,268,751,697.00
8.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		79,695,897,966.00	141,560,344,324.00
9.	Penerimaan Dana Alokasi Umum		519,741,516,000.00	529,034,959,000.00
10.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		156,213,347,801.00	242,075,633,951.00
11.	Penerimaan Dana Penyesuaian		177,360,856,000.00	88,258,129,000.00
12.	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi		58,819,694,016.00	52,980,512,575.00
13.	Penerimaan Hibah		345,722,060.00	774,605,000.00
14.	Penerimaan Lainnya		0.00	96,875,855,000.00
15.	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 14)		1,124,836,946,446.81	1,267,793,248,739.00
16.	Arus Keluar Kas :	5.5.1.2		
17.	Pembayaran Pegawai		435,522,347,699.00	489,272,831,857.00
18.	Pembayaran Barang dan Jasa		192,240,795,538.00	219,426,886,803.00
19.	Pembayaran Subsidi		0.00	0.00
20.	Pembayaran Hibah		24,236,183,159.00	41,091,196,342.00
21.	Pembayaran Bantuan Sosial		12,690,050,000.00	1,697,250,000.00
22.	Pembayaran Tak Terduga		204,000,000.00	816,074,200.00
23.	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		333,002,464.00	833,281,000.00
24.	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah		430,156,564.00	863,925,000.00
25.	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa		184,754,130,000.00	163,540,567,000.00
26.	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		863,014,900.00	784,044,900.00
27.	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 26)		851,273,680,324.00	918,326,057,102.00
28.	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (16 - 27)		273,563,266,122.81	349,467,191,637.00
29.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
30.	Arus Masuk Kas :	5.5.2.1		
31.	Pengjualan atas Peralatan dan Mesin		326,670,000.00	29,700,000.00
32.	Jumlah Arus Masuk Kas		326,670,000.00	29,700,000.00
33.	Arus Keluar Kas :	5.5.2.2		
34.	Perolehan Tanah		3,251,182,000.00	1,817,431,500.00
35.	Perolehan Peralatan dan Mesin		57,068,557,012.10	35,039,732,556.00
36.	Perolehan Gedung dan Bangunan		102,559,577,895.88	58,490,356,142.00
37.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		157,676,383,782.93	242,378,668,767.00
38.	Perolehan Aset Tetap Lainnya		4,057,402,598.00	2,235,158,000.00
39.	Perolehan Aset Lainnya		88,990,000.00	263,360,000.00
40.	Jumlah Arus Keluar Kas (34 s/d 39)		324,702,093,288.91	340,224,706,965.00
41.	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (32 - 41)		(324,375,423,288.91)	(340,195,006,965.00)
42.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
43.	Arus Masuk Kas :	5.5.3.1		
44.	Penerimaan Piutang Daerah		0.00	0.00
45.	Jumlah Arus Masuk Kas		0.00	0.00
46.	Arus Keluar Kas :	5.5.3.2		
47.	Pemberian Pinjaman Daerah		0.00	0.00
48.	Jumlah Arus Keluar Kas		0.00	0.00
49.	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (45 - 48)		0.00	0.00
50.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
51.	Arus Masuk Kas :	5.5.4.1		
52.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		24,318,568,675.00	26,908,227,488.00
53.	Penerimaan Belanja (CP) TA Berjalan		0.00	1,552,954,737.00
54.	Penerimaan Pengembalian UP/TU dan GU Nihil		24,016,844,326.00	20,945,327,950.00
55.	Pengembalian UP/TU Tahun Lalu		0.00	27,579,608.00
56.	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 55)		48,335,413,001.00	49,434,089,783.00
57.	Arus Keluar Kas :	5.5.4.2		
58.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		24,308,298,366.00	26,908,227,488.00
59.	Pengeluaran Dana UP/TU		24,069,384,984.00	20,945,327,950.00
60.	Jumlah Arus Keluar Kas (58 s/d 59)		48,377,683,350.00	47,853,555,438.00
61.	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (56-60)		(42,270,349.00)	1,580,534,345.00

No.	Uraian	CaLK	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
62.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (28+41+49+61)	5.5.5.1	(50,854,427,515.10)	10,852,719,017.00
63.	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan FKTP	5.5.5.2	62,097,331,912.45	51,244,612,895.45
64.	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	5.5.5.3	11,232,634,088.59	62,097,331,912.45
65.	Saldo Akhir Kas di Bendaharan Penerimaan	5.5.5.4	2,063,872.00	6,096,311.00
66.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.5.5	62,810,967.00	0.00
67.	Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.5.6	0.00	682,289,024.00
68.	Saldo Akhir Kas (62 s/d 67)	5.5.5.7	11,297,508,927.59	62,785,717,247.45

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



Barabai, Mei 2018

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. AI CHAIRANSYAH



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

No.	URAIAN	CaLK	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	1,926,804,921,873.40	1,917,922,994,451.29
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	69,292,490,548.94	35,707,652,954.37
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
4	KOREKSI EKUITAS LAINNYA	5.6.3	(90,479,846,286.19)	(26,825,725,532.26)
5	Koreksi Nilai Kas		(432,207,214.76)	
6	Koreksi Nilai Piutang		3,818,234,435.20	
7	Koreksi Nilai Persediaan		(8,580,000.00)	
8	Koreksi Nilai Investasi		0.00	
9	Koreksi Nilai Aset Tetap		939,988,116.53	
10	Koreksi Nilai Aset Lainnya		(51,784,530,740.16)	
11	Koreksi Nilai Utang		(43,012,750,883.00)	
12	EKUITAS AKHIR	5.6.4	1,905,617,566,136.15	1,926,804,921,873.40

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Barabai, Mei 2018

PL. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



H. A. CHAIRANSYAH